

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang monitoring pelaksanaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang sudah dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan proses monitoring melalui beberapa tahapan seperti persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil dari pengawasan. Dalam proses monitoring yang sudah dilakukan sudah berjalan optimal. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Monitoring di Desa Tanjungharjo

Proses monitoring terkait dengan adanya Dana Desa yang ada di Desa Tanjungharjo yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses monitoring sebagai berikut:

a. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)

Terkait dengan proses monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo sudah cukup baik, dikarenakan sudah ada SOP yang jelas yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas monitoring oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan. SOP tersebut yaitu Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa.

b. Adanya Tujuan Monitoring

Dengan adanya monitoring harapannya bisa diketahui ketercapaian suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh desa. Dalam hal ini program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Desa Tanjungharjo Tahun 2016 sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

c. Adanya Indikator Keberhasilan Yang Di Tetapkan

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan membuat indikator keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu untuk menentukan keberhasilan atas pengelolaan dari Dana Desa oleh masing-masing desa. Dilihat dari indikator yang telah ditetapkan tersebut pengelolaan dari Dana Desa di Desa Tanjungharjo sudah cukup baik.

d. Adanya Perencanaan Monitoring

Perencanaan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan sudah dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap persiapan hingga upaya tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan. Sehingga dalam proses monitoring lebih mudah dan tertata dengan baik.

e. Adanya Laporan Pencapaian Dalam Monitoring

Hasil dari monitoring yang telah di laksanakan untuk selanjutnya di laporkan ke Bupati dan Pemerintah Pusat melalui BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Harapannya dengan adanya

pelaporan tersebut Bupati maupun Pemerintah Pusat mengetahui pengelolaan dari Dana Desa oleh masing-masing desa.

2. Faktor yang Mempengaruhi Proses Monitoring

Faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten yang di wakili oleh Inspektorat Daerah (IRDA) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan Pemerintah Kecamatan terdapat dua faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan monitoring Dana Desa yaitu masalah keterbatasan SDM. SDM yang terbatas menyebabkan mobilitas dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan untuk turun langsung ke lapangan menjadi kurang maksimal.

b. Faktor Eksternal

Dimana dalam hal ini terdapat hambatan terkait dengan anggaran. Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan monitoring terkait dengan Dana Desa tidak ada anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sangat riskan, karena apabila anggaran minim atau tidak ada maka sangat minim pula kegiatan yang akan dilaksanakan. Faktor eksternal yang lain yaitu sering terlambatnya laporan realisasi atas penggunaan Dana Desa oleh masing-masing desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka didapatkan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kepada Inspektorat Daerah (IRDA)

Inspektorat Daerah (IRDA) dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebaiknya tidak hanya datang ke 24 (dua puluh empat) desa tetapi datang ke semua desa yang ada diwilayah Kabupaten Kulon Progo. Sehingga dengan datang ke semua desa bisa diketahui permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi oleh masing-masing desa. Harapannya dengan datang ke semua desa wilayah Kabupaten Kulon Progo dalam hal pengelolaan Dana Desa bisa lebih baik dari daerah-daerah lain dan menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan dari Dana Desa.

2. Rekomendasi Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

DPMDPPKB selaku pembina dan pengawas program Dana Desa sebaiknya melakukan pengawasan dengan terlibat langsung dilapangan, melakukan pemantauan dan mengikuti jalannya berbagai kegiatan maupun berbagai program yang telah dijadwalkan, agar dalam proses monitoring yang dilakukan tidak hanya dengan melihat laporan realisasi yang disampaikan oleh masing-masing desa.

3. Rekomendasi Kepada Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan seharusnya dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan ke masing-masing desa yaitu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu setiap triwulan. Sehingga dalam setahun dilaksanakan monitoring sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu dalam hal menindaklanjuti desa-desa yang melakukan permasalahan sebaiknya Pemerintah Kecamatan lebih tegas lagi.

4. Rekomendasi Kepada Desa Tanjungharjo

Desa Tanjungharjo maupun Desa-Desa lainnya yang mendapatkan Dana Desa dalam proses pelaporan atas program-program yang telah dilakukan atau laporan realisasi kegiatan tidak mengalami keterlambatan, dikarenakan apabila ada salah satu desa dalam proses pelaporan mengalami keterlambatan akan berdampak pada desa-desa lainnya dalam hal pencairan dana desa tahap selanjutnya. Selain itu juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari dana Desa tersebut diharapkan sesuai dengan aturan sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Serta guna meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, Pemerintah Desa seharusnya memasang anggaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa berikut dengan penggunaannya di tempat umum seperti pos ronda.